



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)
UNIT KERJA : BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI ACEH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MAIMUN
2. Jabatan : KEPALA
3. NHK : 631245

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **1.897.500.000**

1. Tanah Seluas 502 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 372.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 320 m2/72 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 355.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 2.220 m2/35 m2 di KAB / KOTA GAYO LUES, HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 400 m2/125 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDA ACEH , HASIL SENDIRI Rp. 615.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 125 m2/80 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDA ACEH , HIBAH TANPA AKTA Rp. 315.000.000
6. Tanah Seluas 428 m2 di KAB / KOTA BENER MERIAH, HASIL SENDIRI Rp. 30.500.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **49.500.000**

1. MOTOR, SUZUKI FD 125XSD/SMRD Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
2. MOTOR, HONDA NC11A3CB A/T Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000
3. MOTOR, HONDA F1C02N28L0 AT Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000



4. MOTOR, HONDA VIJ02Q50L1 A/T Tahun 2024, HASIL SENDIRI

Rp. 36.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 380.750.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 48.000.000

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 2.375.750.000

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 2.375.750.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.